

TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (LED) DI JAWA TENGAH

Oleh:
Bambang¹⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSOED

ABSTRACT

This study tried to explore the implementation of Local Economic Development (LED) in Central Java. To perform the analysis, this study makes use of mixed method analysis which combined between quantitative and qualitative approaches. Findings of the study indicate that empowerment of the institutional platform of LED in Central Java is relatively good by the fact that mapping and situation analysis of LED have been done by most of districts in Central Java, although the majority have not been equipped by the action plans including a business plan as well as have not been covered by local budget.

Keywords: LED, mixed method, Central Java.

PENDAHULUAN

Pengembangan wilayah merupakan fungsi dari ekonomi, lingkungan dan sumber daya alam, serta berbagai faktor yang menyertainya (Supriyadi, 2007). Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi kapasitas ekonomi regional yang berkaitan dengan sumber daya alam, keahlian, dukungan sistem politik, administrasi publik, vitalitas, kekuatan budaya dan kohesi sosial. Pengembangan wilayah juga bergantung kepada proses merencanakan strategi, mengembangkan potensi yang dimiliki, dan mengatasi faktor yang menurun atau mendorong pembangunan terhadap wilayah yang lebih luas. Tujuan akhirnya adalah wilayah tersebut akan mampu bersaing, memiliki kapasitas, dan memenuhi kebutuhannya sendiri seiring perubahan sosial dan global.

Dalam konteks pembangunan wilayah terdapat beberapa kebijakan pembangunan yang terus berevolusi seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau dinamika permasalahan yang dihadapi. Secara garis besar kebijakan tersebut dapat diklasifikasikan atas tiga kelompok (Iqbal dan Anugrah, 2009), yaitu kebijakan pengembangan dari atas (*top down*), kebijakan pengembangan dari bawah (*bottom up*), dan kebijakan *local economic development* (pengembangan ekonomi lokal). Pada dasarnya kebijakan-kebijakan tersebut saling melengkapi dan menyempurnakan menurut situasi, kondisi, dan permasalahan yang terjadi. Sesuai dengan tahap keberadaannya, kebijakan yang muncul setelah kebijakan sebelumnya merupakan reaksi dan kritik atas kebijakan sebelumnya.

Kebijakan pengembangan dari atas dan kebijakan pengembangan dari bawah tidak terlepas dari kelemahan sehingga kebijakan *local economic development* menjadi alternatif solusi dari dua kebijakan sebelumnya. Kebijakan pengembangan dari atas memiliki kelemahan karena dapat menimbulkan kesenjangan pada wilayah-wilayah yang lebih kecil akibat eksploitasi sumberdaya oleh

wilayah yang lebih besar. Sementara itu, kebijakan pengembangan dari bawah secara konsep memiliki muatan yang ideal namun seringkali lemah dalam implementasi, sehingga kebijakan ini cenderung bersifat *utopia*. Oleh karena itu, kebijakan *local economic development* (pengembangan ekonomi lokal) dapat dianggap sebagai alternatif dalam mencari solusi permasalahan yang terjadi pada kebijakan pengembangan dari atas dan kebijakan pengembangan dari bawah (Iqbal dan Anugrah, 2009).

Local Economic Development (LED) berupaya melakukan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada yaitu sumberdaya fisik, manusia dan kelemahannya. Dengan demikian, *Local Economic Development* (LED) berintikan pembangunan yang didasarkan pada kemampuan lokal yang semakin berkembang atau *endogenous development*. Dalam istilah lainnya, *Local Economic Development* (LED) merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal lokal guna pembangunan ekonomi lokal (*locally based development*). Pada sisi paradigma berpikir dan bertindak, Sandercock (2003) dalam Iqbal dan Anugrah (2009) memosisikan *Local Economic Development* (LED) sebagai suatu perencanaan yang berbasis komunitas dengan tujuan pemberdayaan, mengurangi campur tangan negara, dan perencanaan yang berpihak untuk kepentingan masyarakat dan komunitas lokal.

Pengembangan program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) di tingkat pusat tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut dihadapi oleh semua program *Local Economic Development* (LED) ditingkat pusat, baik program Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), *Poverty Allocation Rural Urban Linkage* (PARUL) maupun Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL). Pengembangan KAPET cenderung bertujuan untuk menarik investasi dari luar, namun secara realita

daerah mendapatkan prioritas dana alokasi dari pusat yang cukup besar dengan peran pengusaha dan birokrasi pemerintah masih tetap dominan. *Poverty Allocation Rural Urban Linkage* (PARUL) dan Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal (KPEL) yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pasar yang mengkaitkan hubungan perkotaan-perdesaan, meningkatkan pendapatan daerah dan penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan terkait dengan komoditas unggulan, pada kenyataannya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis dan bahkan sering terjadi konflik antar *stakeholders* (Supriyadi, 2007).

Selain diangkat pusat, permasalahan program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) juga terjadi pada tingkat lokal. Program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) di tingkat lokal relatif terfokus pada investasi publik bagi daerah-daerah sentra produksi komoditas unggulan dan programnya berorientasi pada sisi penawaran dan produksi, sementara sisi pemasaran terabaikan. Program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) di tingkat lokal juga ditandai dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan melibatkan hampir semua dinas terkait sehingga sering terjadi tumpang tindih program dan tidak adanya kewenangan yang jelas terhadap program yang dibuat (Supriyadi, 2007).

Pada era otonomi daerah seperti sekarang ini, program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) sudah seharusnya berkembang seiring dengan semakin besarnya wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Visi otonomi daerah sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksi utamanya yaitu politik, ekonomi dan sosial budaya. Ruang lingkup ekonomi memandang bahwa otonomi daerah di satu pihak menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dan di pihak lain terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mendayagunakan potensi ekonomi daerahnya (Rasyid, 2005). Oleh karena itu, otonomi daerah memberi ruang lahirnya berbagai inisiatif pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, memudahkan proses perijinan usaha dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi daerahnya. Hal ini sejalan dengan program dan kegiatan *Local Economic Development* (LED) dimana baik otonomi daerah maupun *Local Economic Development* (LED) mengharuskan secara politik sistem pemerintahan yang demokratis.

Seiring otonomi daerah yang sudah berjalan cukup lama, salah satu daerah yang memiliki visi berdasarkan keunggulan potensi lokal adalah Provinsi Jawa Tengah. Dengan slogan "Bali Ndeso Mbangun Deso", Provinsi Jawa Tengah berupaya mewujudkan visinya yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dengan mengoptimalkan keunggulan lokalnya yaitu pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis

pertanian, UMKM dan industri padat karya dan memantapkan kondisi sosial budaya yang berbasis kearifan lokal.

Orientasi pembangunan yang lebih mengutamakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah yang cenderung bias perkotaan (*urban bias*). Kondisi ini diperkuat dengan adanya diskriminasi terhadap wilayah perdesaan dan sektor pertanian. Efek penetes (*trickle down effect*) yang semula diharapkan terjadi, malah seringkali menimbulkan terjadinya transfer sumberdaya secara tidak seimbang dari wilayah perdesaan ke kawasan perkotaan. Hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah desa ke kawasan kota dan eksploitasi kawasan perdesaan mengakibatkan kerusakan ekosistem dan memicu kemiskinan masyarakat perdesaan. Situasi dan kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kinerja sektor pertanian (Iqbal dan Anugrah, 2009).

Kesenjangan dari pembangunan yang bias perkotaan juga terjadi di Jawa Tengah. Kondisi sektor pertanian di Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan paling kecil dibandingkan sektor lainnya. Padahal sektor pertanian ini menyerap jumlah tenaga kerja paling besar dibandingkan sektor lainnya (Badan Pusat Statistik, 2012). Oleh karena itu, perlu peran yang optimal dari berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan ini dan memaksimalkan sektor pertanian sebagai basis ekonomi di Jawa Tengah yang berdaya saing. Disinilah peran pembangunan yang berbasis pembangunan lokal (*Local Economic Development*) setelah adanya otonomi daerah dan berdasarkan visi pembangunan yang menjunjung konten lokal sangat diperlukan.

Program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah pada awalnya mengacu pada inisiasi program *Local Economic Development* (LED) Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 2006 yang ditandai dengan proyek percontohan *Local Economic Development* (LED) di Kabupaten Jepara, Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten (TARPEL Jawa Tengah, 2011). Pada tahun 2009 Jawa Tengah kemudian secara formal menginisiasi program *Local Economic Development* (LED) di 24 kota dan kabupaten, dengan melakukan penilaian cepat kondisi *Local Economic Development* (LED).

Fokus kebijakan perekonomian Provinsi Jawa Tengah salah satunya adalah berupa peningkatan dan pengembangan peran UMKM dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor, serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan mengembangkan klaster usaha dan kawasan khususnya pertanian, industri

dan pariwisata. Pengembangan kluster usaha ini dilakukan dalam rangka mendorong penguatan kegiatan bisnis bersama oleh UMKM yang dapat menghasilkan efisiensi kolektif dalam kluster usaha. Kondisi program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah ini sebenarnya bukan program baru, karena sebelumnya sudah ada program pengembangan kluster yang dilakukan oleh FEDEP dan FESDP Jawa Tengah.

Sejak tahun 2009, program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Dengan program pengembangan kluster usaha dan kawasan, beberapa permasalahan yang dihadapi oleh program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah antara lain :

1. Masih kurangnya dukungan Pemerintah Pusat dalam *Local Economic Development* (LED) di kabupaten/ kota, baik dari segi kebijakan maupun rencana aksi;
2. Komitmen dan pengembangan *masterplan Local Economic Development* (LED) berbeda-beda di masing-masing kabupaten/ kota;
3. Akses perbankan dan permodalan bagi pelaku usaha masih belum sesuai dengan yang diharapkan;
4. Belum adanya panduan aplikatif *bussines plan* pengembangan kluster usaha di kabupaten/ kota;
5. Sumber daya manusia pelaku *Local Economic Development* (LED) di kabupaten/ kota, baik secara jumlah maupun kompetensi masih terbatas;
6. Hubungan kerja antar pelaku FEDEP sebagai lembaga yang mengawal dan mendampingi *Local Economic Development* (LED) masih belum harmonis dalam mendukung keberhasilan *Local Economic Development* (LED) itu sendiri;
7. Data dasar potensi ekonomi di kabupaten/ kota masih belum maksimal.

Dengan permasalahan yang ada tersebut, maka penelitian ini akan menelaah implementasi dari kebijakan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah. Harapannya adalah akan didapatkan temuan yang komprehensif tentang realita yang ada dari implementasi kebijakan LED baik dan permasalahan yang melatarbelakanginya.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap responden kunci (*key person*). Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi dan laporan monitoring dan evaluasi Tenaga Ahli Regional Pengembangan Ekonomi Lokal (TARPEL) Jawa Tengah dan naskah dan dokumen yang dimiliki oleh FEDEP (*forum for*

economic development and employment promotion) kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Untuk melakukan analisis, penelitian ini menggunakan metode gabungan (*mixed methods*) yaitu menggunakan lebih dari satu metode atau lebih melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif (Sarwono, 2011). Metode gabungan (*mixed methods*) ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif. Metode gabungan (*mixed methods*) juga dapat menambah cakupan dan ruang lingkup penelitian.

Strategi yang dipilih dalam penelitian yang menggunakan metode campuran ini adalah strategi penjelasan berurutan. Strategi penjelasan berurutan ini merupakan strategi yang populer untuk model metode campuran, yang sering dipertimbangkan untuk penelitian dengan lebih kuat menyandarkan pada kuantitatif. Dalam penelitian ini, strategi penjelasan yang berurutan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif sebagai sub-ordinate dari pendekatan kuantitatif yang lebih dominan (Sarwono, 2011). Hal itu dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama dengan mengumpulkan dan menganalisa data kuantitatif yang kemudian diikuti tahap kedua dengan mengumpulkan dan menganalisa data kualitatif. Bentuk strategi penjelasan berurutan ini secara khusus digunakan untuk menjelaskan dan menafsirkan hasil kuantitatif yang ditindaklanjuti dengan data kualitatif. Hal ini dapat digunakan terutama ketika hasil yang tidak terduga dari kuantitatif.

Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan data angka dengan berbagai klasifikasi dalam bentuk persentase, frekuensi, nilai rata-rata dan sebagainya yang diolah secara sistematis dengan rumus-rumus statistik (Marzuki, 2005). Adapun pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam setting tertentu yang ada dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya (Finlay, 2006 dalam Chariri, 2009). Chariri (2009) juga menyebutkan bahwa tujuan utama pendekatan kualitatif adalah membuat fakta mudah dipahami dan jika memungkinkan (sesuai dengan model) dapat menghasilkan hipotesis baru.

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran umum penerapan program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah. Temuan dari pendekatan kuantitatif ini kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui hasil wawancara mendalam terhadap responden kunci (*key person*) yang memahami betul tentang implementasi *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah

Program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh *Germany Technical Cooperation* (GTZ) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pengembangan dan pembinaan UKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terdapat beberapa permasalahan yaitu:

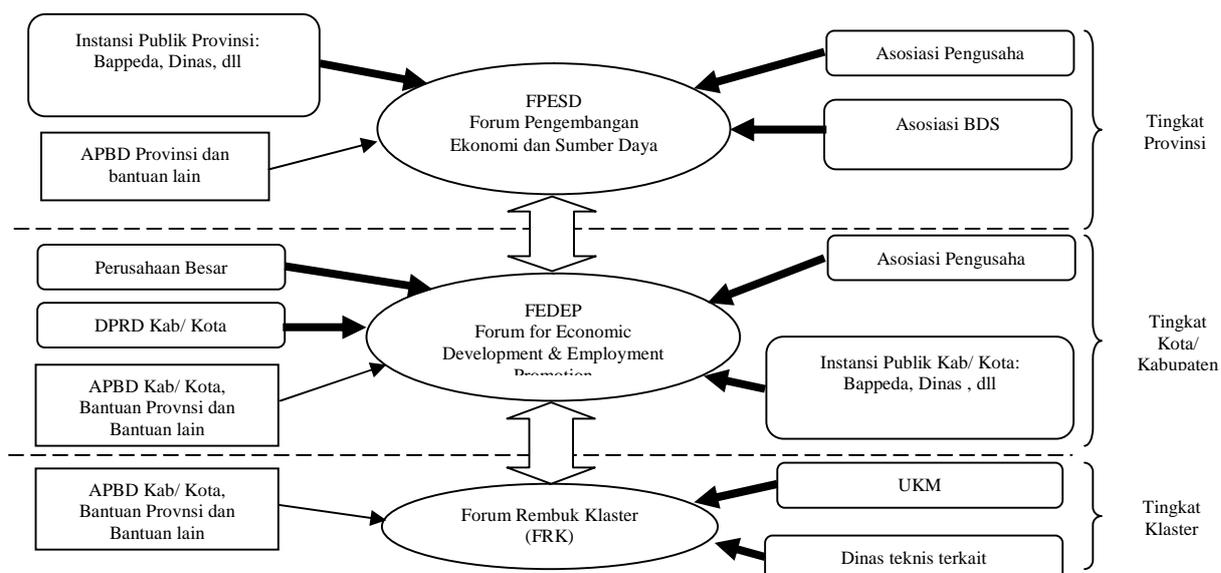
- Terjadinya tumpang tindih kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Pengembangan UKM masih bersifat sektoral
- Program sering kali tidak berkesinambungan
- Partisipasi bersifat linier (kurang melibatkan berbagai pihak yang terkait)
- Belum adanya sinergi dengan pihak lain
- Sulit di dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi karena program, fokus dan lokasi (lokasi) kurang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, rekomendasi yang harus dijalankan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut adalah dengan pembentukan forum pengembangan ekonomi lokal (*local economic development*). Forum *Local Economic Development* (LED) tersebut dibagi menjadi dua wilayah kerja yaitu provinsi yang diberi nama Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD), dan kabupaten/ kota yang diberi nama *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP). Secara grafis, kelembagaan forum *Local*

Economic Development (LED) di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.

FPESD dan FEDEP merupakan forum kemitraan pemerintah dan non pemerintah yang terlembaga dengan beranggotakan SKPD, DPRD, KADIN, Asosiasi Usaha, Perguruan Tinggi, Perwakilan UMKM (Klaster), FEDEP Kabupaten/ Kota (untuk anggota FPESD). Tugas FPESD dan FEDEP adalah membantu Kepala Daerah dalam membentuk formulasi kebijakan, fasilitasi pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah. Adapun tujuan pembentukan FPESD dan FEDEP yaitu mempercepat program *Local Economic Development* (LED) berbasis klaster yang berkelanjutan.

Pada Gambar 1 dapat dilihat keterkaitan antar kelembagaan forum *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah. Sebagai forum kelembagaan di tingkat provinsi, keanggotaan FPESD setidaknya terdiri dari asosiasi pengusaha (KADIN), *Asosiasi Bussines Development Services* (BDS) dan instansi publik di tingkat provinsi (Bappeda, Dinas terkait, Badan Penanaman Modal Daerah dan lain-lain). Adapun di tingkat kabupaten/ kota, anggota FEDEP terdiri dari beberapa komponen antara lain asosiasi pengusaha, perusahaan besar, DPRD kabupaten/ kota dan instansi publik di tingkat kabupaten/ kota (Bappeda, Dinas terkait, dan lain-lain). Untuk melakukan kegiatan yang terkait dengan *Local Economic Development* (LED) FPESD memperoleh pendanaan dari APBD Provinsi dan bantuan lain (Pusat maupun dari lembaga donor), sedangkan FEDEP memperoleh pendanaan dari APBD Kabupaten/ Kota, bantuan provinsi dan bantuan lainnya.



Sumber: Bappeda Jawa Tengah, 2010

Gambar 1. Kelembagaan LED Di Jawa Tengah

Selain FPESD dan FEDEP, Forum Rembuk Klaster (FRK) merupakan satuan kelembagaan terkecil sebagai wilayah usaha produksi yang terdapat di masing-masing kabupaten/ kota. Forum Rembuk Klaster (FRK) terdiri dari kumpulan UKM yang didukung dengan dinas/ instansi yang terkait. Klaster yang ada di kabupaten/ kota inilah yang menjadi *prime mover* perekonomian dan inti dari program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah.

Pengembangan klaster usaha di Jawa Tengah difokuskan pada tiga sektor utama yaitu pertanian, industri dan pariwisata. Tujuan dari pengembangan klaster ini adalah diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat lokal sehingga mendukung tujuan pembangunan di Jawa Tengah yang *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. Klaster di Jawa Tengah dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu pemula, berkembang dan maju. Jumlah klaster yang ada di Jawa Tengah sebagai bagian dari program *Local Economic Development* (LED) adalah 185 klaster yang terdiri dari 43 klaster pertanian (37 kategori pemula dan 6 kategori berkembang), 122 klaster industri (71 kategori pemula, 50 kategori berkembang dan 1 kategori maju), dan 10 klaster pariwisata (6 kategori pemula dan 4 kategori berkembang) (Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah, 2012).

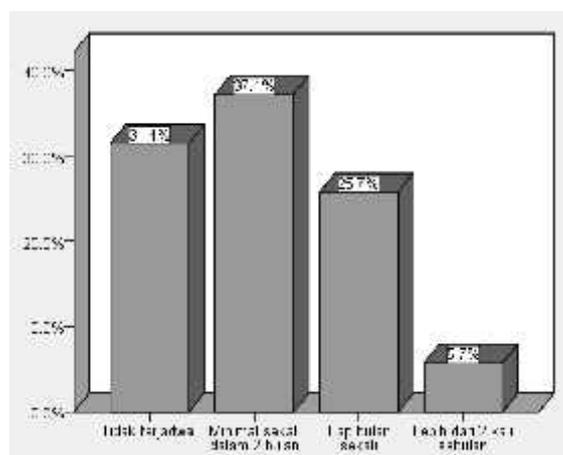
Forum kelembagaan *Local Economic Development* (LED) baik itu FPESD, FEDEP maupun Forum Rembuk Klaster (FRK), merupakan pelaksana maupun pengawal dari pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED). Secara garis besar, peta jalan (*roadmap*) dari kegiatan program *Local Economic Development* (LED) dikejawantahkan dalam tahapan-tahapan kegiatan yang pelaksanaannya dikawal secara bersama-sama oleh stakeholder yang ada. Tahapan-tahapan tersebut terdiri dari penyiapan dan penguatan platform kelembagaan (FEDEP), pemetaan dan analisis kondisi (LED), penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED), rencana bisnis usaha dan internalisasi pada anggaran daerah, pelaksanaan program (LED), serta monitoring, evaluasi, dan perbaikan.

2. Penguatan Platform Kelembagaan Local Economic Development (LED)

Untuk menjamin berjalannya program *Local Economic Development* (LED) sesuai dengan yang diharapkan, kuatnya *platform* kelembagaan merupakan fondasi awal bagi keberhasilan program tersebut. Penguatan *platform* kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah dilakukan dengan memanfaatkan FEDEP (*forum for economic development and employment promotion*) yang telah berjalan di masing-masing kota dan kabupaten. Hasil dari kegiatan ini adalah kesiapan platform kelembagaan yang dibutuhkan untuk pengelolaan *Local Economic Development* (LED). Kelembagaan ini terdiri dari lembaga yang berfungsi melakukan eksekusi kegiatan diantaranya

Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), kelompok pelaku usaha, kelompok penunjang usaha, dan *Business Development Services* (BDS).

Untuk mengevaluasi kesiapan platform kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah, setidaknya terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan kuat atau lemahnya kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah. Indikator-indikator tersebut antara lain intensitas dialog multistakeholder dalam forum LED/ FEDEP, tingkat partisipasi anggota FEDEP, upaya promosi kelembagaan FEDEP, upaya promosi klaster, upaya jejaring FEDEP/ forum LED, formulasi kebijakan yang dihasilkan, dan ketersediaan dana pendamping baik itu dari Eks 2 POA maupun dana pendamping dari APBD kabupaten/ kota.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 2. Intensitas Dialog Multistakeholder dalam Forum LED/ FEDEP

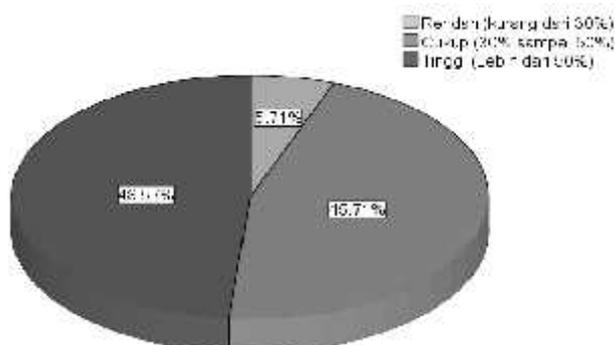
Intensitas dialog multistakeholder dalam forum LED/ FEDEP merupakan indikator untuk melihat keseriusan stakeholders dalam mendukung berjalannya program *Local Economic Development* (LED) dengan baik. Dialog multistakeholder dalam forum LED/ FEDEP diperlukan untuk menjangkau ide atau gagasan terkait dengan kebijakan dari program *Local Economic Development* (LED), mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan, serta menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi selama program *Local Economic Development* (LED) berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tenaga Ahli Regional Pengembangan Ekonomi Lokal (TARPEL) Jawa Tengah dapat diketahui bahwa intensitas dialog multistakeholder dalam forum LED/ FEDEP masih tergolong sangat rendah yaitu mayoritas forum LED/ FEDEP kabupaten/ kota di Jawa Tengah melakukan dialog minimal sekali dalam dua bulan.

Intensitas dialog multistakeholder forum LED/ FEDEP di Jawa Tengah yang tergolong masih rendah dapat dilihat pada Gambar 2. Pada tahun 2011 forum LED/ FEDEP kabupaten/ kota di Jawa

Tengah mayoritas melakukan dialog minimal sekali dalam dua bulan yaitu sebanyak 37,1 persen dan tidak terjadwal sebanyak 31,4 persen dari 35 kabupaten/ kota yang ada. Adapun forum LED/ FEDEP kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang melakukan dialog setiap sebulan sekali yaitu sebanyak 25,7 persen dan lebih dari dua kali sebulan sebanyak 5,7 persen dari total kabupaten/ kota yang ada. Intensitas dialog multistakeholder forum LED/ FEDEP di Jawa Tengah yang tergolong masih rendah disebabkan oleh dua hal utama yaitu terbatasnya anggaran yang ada dan masalah komunikasi antar stakeholder yang belum optimal. Selain itu, permasalahan intensitas dialog yang masih rendah juga diperparah dengan adanya permasalahan lainnya seperti pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 berikut ini:

"Ada beberapa kendala yang menyebabkan intensitas dialog antar stakeholder tergolong rendah, yaitu pemahaman anggota tentang peran dan fungsi FEDEP masih belum optimal, cepatnya pergantian pengurus FEDEP, serta perencanaan dan pengelolaan kegiatan Economic Development (LED) selama ini belum optimal".

Keseriusan stakeholders dalam mendukung berjalannya program *Local Economic Development* (LED) juga dapat dilihat melalui tingkat partisipasi anggota FEDEP dalam setiap dialog yang dilakukan. Tingkat partisipasi anggota FEDEP juga menunjukkan kesolidan dalam kelembagaan FEDEP itu sendiri. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggota FEDEP membuka peluang bagi dialog yang dilakukan untuk menghasilkan ide dan gagasan berharga bagi kebijakan program *Local Economic Development* (LED). Tingkat partisipasi anggota FEDEP ini diukur berdasarkan tingkat kehadiran anggota dalam dialog dan rapat yang dilakukan berkaitan dengan program *Local Economic Development* (LED).



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Anggota FEDEP

Pada Gambar 3 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 partisipasi anggota FEDEP kabupaten/ kota di Jawa Tengah tergolong tinggi. Kabupaten/

kota yang memiliki kategori partisipasi anggota FEDEP yang tinggi yaitu sebanyak 48,57 persen, sedangkan dengan kategori cukup (kehadiran anggota 30 sampai 50 persen) mencapai sebanyak 45,71 persen. Adapun kabupaten/ kota yang memiliki kategori partisipasi anggota FEDEP yang rendah (dibawah 30 persen) hanya sebesar 5,71 persen. Beberapa penyebab yang menjadikan partisipasi anggota dalam dialog dan rapat yang cukup tinggi diungkapkan oleh Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 seperti berikut ini:

"Tenggat waktu pelaksanaan rapat dan dialog yang cukup lama (2-3 kali dalam setahun) merupakan faktor utama partisipasi anggota FEDEP dalam rapat dan dialog cukup tinggi. Apalagi pelaksanaan yang dikaitkan dengan tema atau isu tertentu dan kebutuhan anggota FEDEP untuk mendapatkan informasi perkembangan program LED membuat mereka cukup aktif dalam dialog dan rapat".

Walaupun tergolong tinggi, partisipasi anggota FEDEP dalam setiap dialog yang dilakukan tidak ada artinya apabila konsistensi anggota yang hadir berubah-ubah. Ini terlihat dari masih seringnya anggota yang hadir dalam dialog bukan selalu orang-orang yang sama. Hal ini juga diperparah dengan koordinasi dan kesepahaman antar anggota terhadap program *Local Economic Development* (LED) yang belum optimal. Selain itu, masih adanya daerah yang memiliki partisipasi anggota yang rendah perlu mendapat perhatian. Secara khusus, Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 mengungkapkan bahwa:

"Ada beberapa permasalahan yang menyebabkan partisipasi anggota di beberapa daerah dalam rapat dan dialog yang rendah, diantaranya adalah adanya permasalahan internal dalam FEDEP, belum adanya staf sekretariat (unsur swasta yang dibiayai untuk membantu administrasi dan operasional FEDEP), pemahaman akan peran dan fungsi FEDEP yang masih lemah dan situasi politik di kabupaten/ kota yang tidak mendukung".

Pendapat yang menguatkan disampaikan oleh Ibu Artiningsih, anggota TARPEL Jawa Tengah dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Diponegoro, tanggal 20 Maret 2013 berikut ini:

"Di dalam FEDEP kabupaten/ kota partisipasi anggotanya juga dipengaruhi oleh culture yang ada di setiap wilayah. Jawa Tengah bagian tengah (Bakorwil I) orang-orangnya secara culture memiliki etos dan pengabdian yang tinggi. Ini diyakini karena wilayah itu dari dulu dekat dengan pertanian dan kerajaan, sehingga sifat mengabdikan pada gusti itu tinggi dan itu membuat etos kerja mereka tinggi. Kondisi wilayah Pantura berbeda mengingat basis masyarakatnya adalah perdagangan. Perdagangan itu secara pendapatan

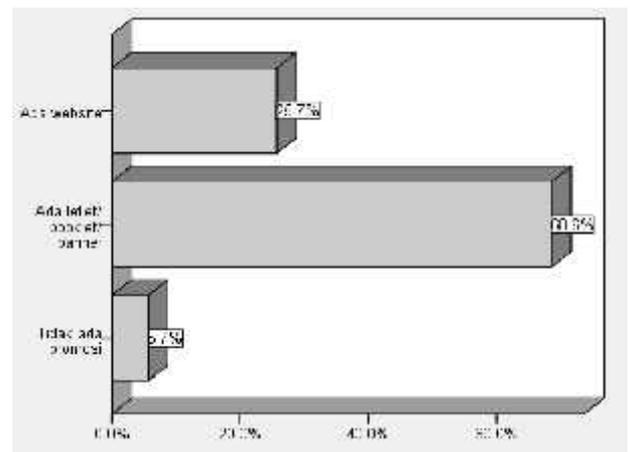
hasilnya instan tidak melalui proses panjang seperti pertanian yang membuat mindset masyarakatnya lebih mencari untung, jadi kalo menguntungkan mereka berpartisipasi tetapi kalau tidak menguntungkan tidak berpartisipasi. Hal ini yang mengakibatkan partisipasi anggota FEDEP di wilayah Pantura cenderung rendah. Ada lagi daerah yang pemerintah daerahnya menyediakan uang transportasi (sekitar Rp 20.000,- sampai Rp 30.000,-), sehingga anggota FEDEP semangat untuk datang pada rapat dan dialog FEDEP”.

Selain partisipasi anggota FEDEP, keberadaan partisipasi masyarakat setempat juga mutlak diperlukan. Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam program *Local Economic Development* (LED). Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain pembentukan dan pembinaan kluster melalui Forum Rembuk Kluster, pelatihan-pelatihan, kerjasama yang intensif antara pihak swasta dan pemerintah, menyusun bussiness plan kluster agrowisata, melakukan studi banding dan memfasilitasi UKM dengan pemberian alat-alat produksi. Upaya-upaya tersebut sesuai dengan hasil wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau terlibat dalam *Local Economic Development* diantaranya dengan melakukan pembinaan kluster secara terus menerus, kerjasama yang intensif antara pihak swasta dan pemerintah, menyusun bussiness plan kluster agrowisata, melakukan studi banding dan memfasilitasi UKM dengan pemberian alat-alat produksi (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)”
 “Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan kluster melalui Forum Rembuk Kluster (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)”

“Melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan terhadap anggota kluster yang ada (Usman Sidiq, FEDEP Kab. Brebes)”.

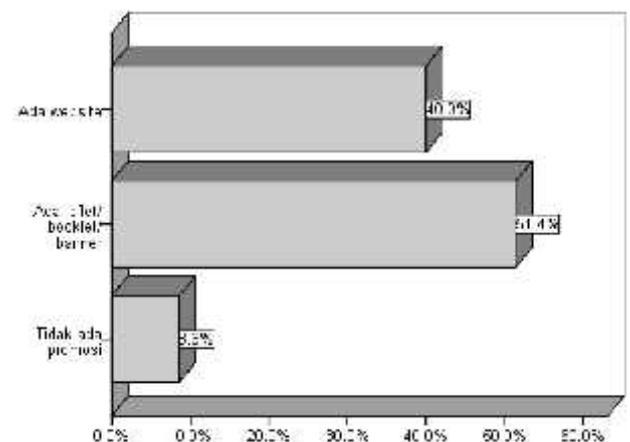
Untuk menguatkan platform kelembagaan program *Local Economic Development* (LED) juga dapat dilakukan melalui upaya promosi baik promosi kelembagaan FEDEP maupun promosi kluster. Upaya promosi kelembagaan FEDEP dan Kluster ini diperlukan untuk menunjukkan eksistensi dan memperkuat posisi tawar FEDEP dan Kluster tersebut di mata masyarakat dan stakeholders. Promosi kelembagaan FEDEP ditujukan untuk menunjang kinerja dalam menjalankan dan mengawal program *Local Economic Development* (LED) di masing-masing kabupaten/ kota. Adapun promosi Kluster ditujukan untuk menunjang kinerja Kluster terutama untuk mendapatkan dukungan baik pendanaan, bantuan peralatan atau teknologi, maupun jaringan pemasaran.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 4. Upaya Promosi Kelembagaan FEDEP

Upaya promosi kelembagaan FEDEP di masing-masing kabupaten/ kota di Jawa Tengah tergolong masih sangat sederhana. Ini terlihat dari media promosi kelembagaan FEDEP kabupaten/ kota di Jawa Tengah masih didominasi oleh leaflet, booklet atau banner. Upaya promosi dengan media tersebut mencapai 68,6 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Adapun FEDEP yang memiliki website sebagai media promosinya hanya sebesar 25,7 persen. Bahkan masih terdapat sebesar 5,7 persen FEDEP yang tidak melakukan upaya promosi.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 5. Upaya Promosi Kluster

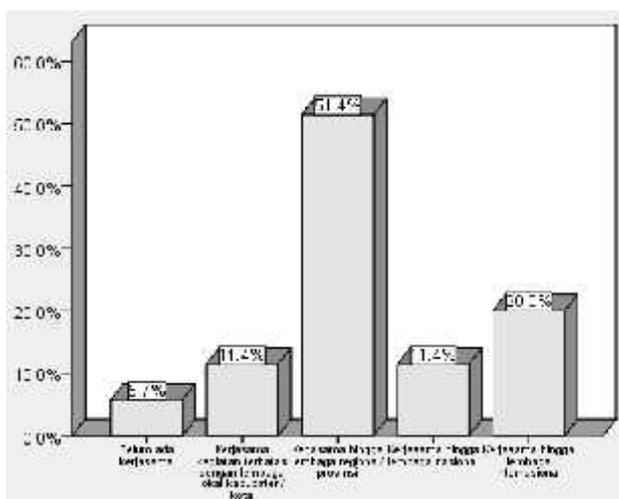
Tidak jauh berbeda dengan upaya promosi kelembagaan FEDEP, pada tahun 2011 upaya promosi kluster dengan media leaflet, booklet dan banner juga mendominasi. Upaya promosi kluster dengan media tersebut mencapai 51,4 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Adapun upaya promosi Kluster dengan media website sudah mencapai 40 persen. Pada Gambar 5 juga dapat dilihat bahwa masih terdapat Kluster

yang tidak melakukan yaitu sebanyak 8,6 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada.

Masih sederhananya media promosi baik itu untuk FEDEP maupun klaster lebih utama dikarenakan masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam FEDEP tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 berikut ini:

“Penyebab utama masih sederhananya media promosi FEDEP dan klaster lebih dikarenakan masih rendahnya kualitas SDM dalam FEDEP itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya anggota FEDEP dan klaster yang belum bisa mengoperasikan komputer dan internet. Selain itu, belum dipahaminya manfaat media promosi secara optimal dan perasaan cukup puas dari anggota FEDEP dan klaster terhadap capaian promosi selama ini merupakan penyebab lainnya yang membuat masih sederhananya media promosi”.

Indikator penguatan platform kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah berikutnya adalah upaya jejaring FEDEP atau forum *Local Economic Development* (LED). Upaya jejaring FEDEP atau forum *Local Economic Development* (LED) dilakukan untuk meningkatkan kinerja program *Local Economic Development* (LED) di masing-masing kabupaten/ kota dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Jangkauan jejaring yang semakin luas merupakan indikator kuatnya kelembagaan FEDEP di mata pihak eksternal. Upaya jejaring FEDEP atau forum *Local Economic Development* (LED) ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga lokal kabupaten/ kota, lembaga regional/ provinsi, lembaga nasional atau dengan lembaga internasional.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 6. Upaya Jejaring FEDEP/ Forum LED

Pada Gambar 6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 mayoritas FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) sudah melakukan

kerjasama dengan lembaga setingkat regional/ provinsi. FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) yang sudah melakukan kerjasama dengan lembaga setingkat regional/ provinsi yaitu sebanyak 51,4 persen. Banyaknya FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) yang sudah melakukan kerjasama dengan lembaga lokal atau setingkat kabupaten/ kota dan lembaga nasional yaitu masing-masing sebesar 11,4 persen. Selain itu, ternyata ada juga FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) sudah melakukan kerjasama dengan lembaga internasional yaitu sebanyak 20 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Yang sangat disayangkan dari upaya jejaring FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) ini yaitu masih adanya FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) yang tidak melakukan kerjasama dengan lembaga manapun.

Keberhasilan FEDEP dalam melakukan jejaring tidak terlepas dari sosialisasi program *Local Economic Development* (LED) yang terus menerus, koordinasi dan komunikasi yang semakin baik dan kesadaran akan pentingnya membangun jejaring itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 yaitu sebagai berikut:

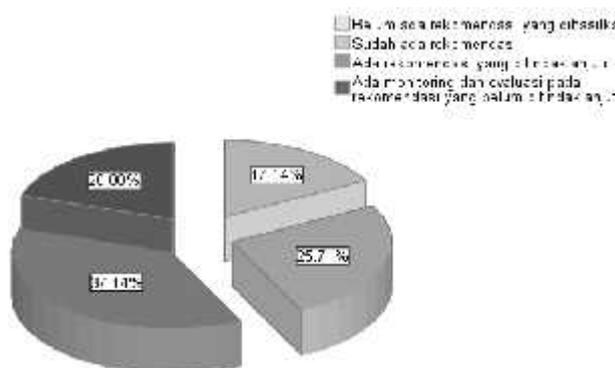
“Faktor yang menyebabkan keberhasilan jejaring yang dilakukan FEDEP diantaranya dilaksanakannya sosialisasi secara terus menerus sesuai dengan kebutuhan dan isu yang sedang berkembang, kesadaran akan pentingnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama yang semakin meningkat, kesadaran akan pentingnya membangun jejaring, serta keberadaan FEDEP yang mencakup SKPD, tokoh masyarakat dan pengusaha, sehingga memiliki kekuatan/ power untuk merekomendasikan dan mengawal kebijakan-kebijakan yang terkait dengan program Local Economic Development (LED)”.

Secara terpisah, peran local champion juga sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program *Local Economic Development* (LED) secara umum dan mengembangkan kerjasama dan jejaring secara khusus. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari oleh Ibu Artiningsih, anggota TARPEL Jawa Tengah dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Diponegoro, tanggal 20 Maret 2013 seperti berikut ini:

“Adanya leadership kuat dari ‘local champion’ dalam klaster secara voluntary mampu mendorong pengembangan modal sosial dalam klaster untuk melakukan kerjasama, jejaring, transfer pengetahuan dan peningkatan usaha bersama klaster (pengalaman klaster pariwisata berbasis pertanian organik di Betisrejo, Sragen dan Klaster Pengasapan Ikan di Wonosari, Demak)”.

Hasil dari penguatan platform kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah dapat terlihat melalui rekomendasi

kebijakan yang dihasilkan oleh FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED). Semakin kuat pengaruh kelembagaan FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) maka semakin banyak rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota. FEDEP sebagai forum yang mewadahi berbagai pihak, merupakan media yang tepat untuk menuangkan ide dan gagasan berupa kebijakan bagi kemajuan daerahnya. Formulasi kebijakan inilah yang kemudian dapat dijadikan salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi masyarakat lokal. Formulasi kebijakan yang dihasilkan dapat berupa pembangunan infrastruktur, bantuan pendanaan dan program-program pembangunan lainnya.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 7. Formulasi Kebijakan

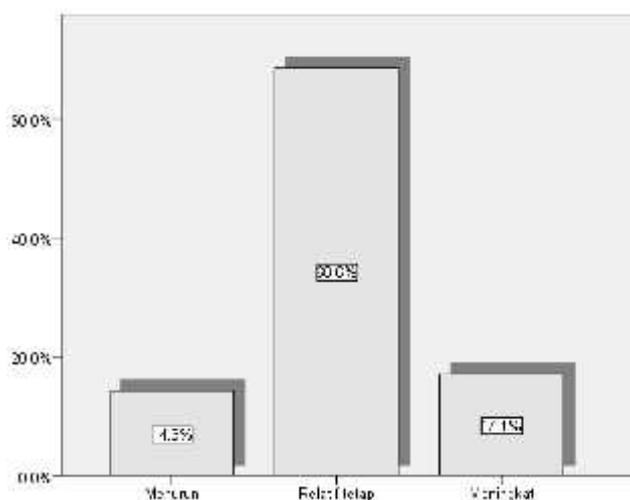
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Regional Pengembangan Ekonomi Lokal (TARPEL) Jawa Tengah, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 mayoritas FEDEP kabupaten/ kota sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sudah ditindaklanjuti dan ada evaluasi terhadap yang belum ditindaklanjuti. FEDEP yang sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sudah ditindaklanjuti dan ada evaluasi terhadap yang belum ditindaklanjuti berjumlah 37,14 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Adapun FEDEP yang sudah menghasilkan rekomendasi yang ditindaklanjuti tetapi belum ada monitoring dan evaluasi yaitu sebanyak 25,71 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Selain itu masih ada FEDEP yang belum memberikan rekomendasi dan sudah ada rekomendasi tetapi belum ditindaklanjuti yaitu masing-masing sebanyak 17,14 persen dan 20 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Kebutuhan aktual akan permasalahan yang ingin diselesaikan dan kemampuan pengurus FEDEP mengawal kebijakan menjadi kunci utama rekomendasi kebijakan yang diajukan FEDEP dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh anggota Bapak Massa,

anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 seperti berikut ini.

"Pemerintah daerah akan melaksanakan rekomendasi yang diajukan FEDEP jika rekomendasi yang diajukan sesuai kebutuhan aktual terhadap permasalahan yang ingin diselesaikan. Selain itu, kemampuan pengurus FEDEP untuk mengawal kebijakan yang diusulkan (ada anggota FEDEP dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai, pengusaha, dan lain-lain) juga sangat penting agar kebijakan itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah".

Untuk mendukung penguatan platform kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah tidak dapat terlepas dari dukungan dana baik melalui dana eks 2 POA maupun dana pendamping dari APBD setempat. Dukungan dana ini dibutuhkan untuk mendukung kinerja FEDEP baik sebagai pendukung operasional lembaga FEDEP itu sendiri maupun memberikan dukungan dana bagi pengembangan kluster. Dana pendamping dari APBD kabupaten/ kota dapat dijadikan tolak ukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam mendukung program *Local Economic Development* (LED) di daerahnya.

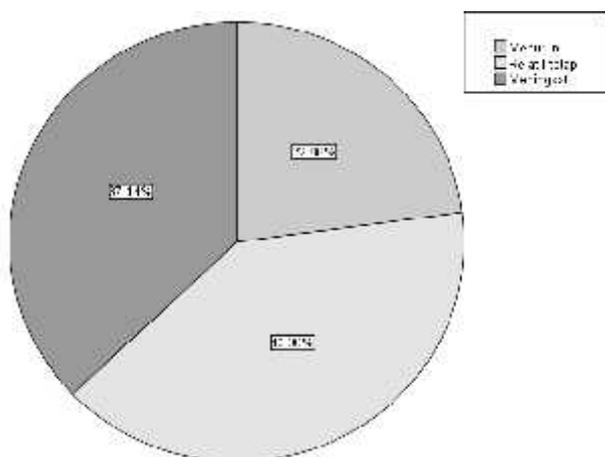


Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 8. Perolehan Dana Eks 2 POA

Kondisi dukungan dana bagi program *Local Economic Development* (LED) kabupaten/ kota di Jawa Tengah yang berasal dari dana eks 2 POA ditunjukkan pada Gambar 8 dan dana pendamping dari APBD ditunjukkan pada Gambar 9. Pada Gambar 8 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 mayoritas perolehan dana yang berasal dari eks 2 POA mayoritas relatif tetap yaitu sebanyak 68,6 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Adapun yang meningkat sebanyak 17,1 persen dan yang menurun sebanyak 14,3 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Pada Gambar 9 juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2011

perolehan dana pendamping dari APBD kabupaten/ kota mayoritas relatif tetap yaitu sebanyak 40 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Adapun kabupaten/ kota yang memperoleh dana pendamping dari APBD untuk program *Local Economic Development* (LED) yang meningkat cukup banyak yaitu sebesar 37,14 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah, sedangkan yang menurun sebanyak 22,86 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Perolehan dana pendamping dari APBD untuk program *Local Economic Development* (LED) yang meningkat menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/ kota semakin serius mendukung program *Local Economic Development* (LED) di daerahnya.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 9. Dana Pendamping dari APBD Kabupaten/ Kota

Besaran dana pendamping baik itu dari APBD maupun dana eks 2 POA sangat bergantung pada kebutuhan masing-masing FEDEP dan orientasi pemerintah daerah apakah pro *Local Economic Development* (LED) atau tidak. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah berikut ini:

"Selama ini dana pendamping disesuaikan dengan tingkat kinerja kebutuhan masing-masing kabupaten/ kota (Bapak Massa, tanggal 21 Januari 2013)".

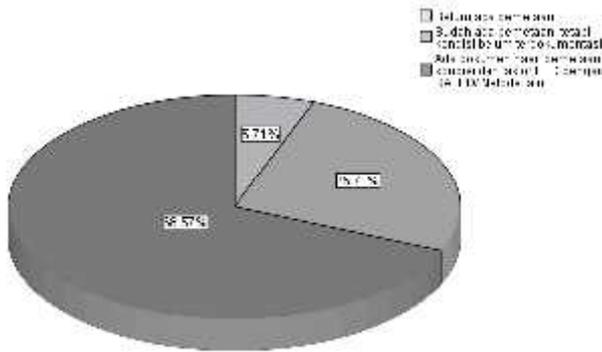
"Dana pendamping itu sangat bergantung pada pengambil kebijakannya. Apakah Bupati atau Walikota-nya pro Local Economic Development (LED) atau tidak. Trennya kebijakan ala Jokowi menodorong pemerintah daerah mengikuti kebijakan yang pro rakyat. Oleh karena itu, ada kecenderungan bahwa daerah yang pengambil kebijakannya pro rakyat memiliki dana pendamping yang lebih besar daripada daerah yang tidak pro rakyat. Dana pendamping juga besarnya sangat bergantung pada besaran pendapatan daerah itu (Ibu Artiningsih, tanggal 20 Maret 2013)".

3. Pemetaan dan Analisis Kondisi *Local Economic Development* (LED)

Pemetaan kondisi *Local Economic Development* (LED) daerah ditujukan untuk mengidentifikasi potensi lokal dari *Local Economic Development* (LED), faktor-faktor pendukung, serta lingkungan strategis yang diperlukan sebagai pengungkit pengembangan kluster dan produk unggulan. Kriteria utama penentuan produk unggulan ini adalah produk yang memiliki nilai tambah yang besar, memiliki dampak multiplier dalam bisnis usaha domestik maupun internasional. Hasil dari kegiatan ini berupa pemetaan dan analisis kondisi ekonomi lokal, dilanjutkan dengan penentuan dan kesepakatan kluster dan produk unggulan UMKM di masing-masing kota dan kabupaten. Kluster maupun produk unggulan daerah dapat berupa beberapa produk dan kluster usaha yang berpotensi paling baik dan memiliki daya saing usaha untuk mendukung *Local Economic Development* (LED) di daerah.

Hasil evaluasi pemetaan dan analisis kondisi *Local Economic Development* (LED) kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2011 dapat dilihat dari beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut setidaknya menggambarkan langkah-langkah kegiatan dari pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED), analisis dan penilaian kondisi *Local Economic Development* (LED), penentuan faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED), serta penetapan kluster dan produk unggulan. Melalui indikator-indikator tersebut akan dapat dilihat seberapa jauh pemetaan dan analisis kondisi *Local Economic Development* (LED) telah dilakukan baik oleh FEDEP maupun Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Setelah dilakukannya penyiapan dan penguatan platform kelembagaan *Local Economic Development* (LED), tahapan yang dilakukan berikutnya adalah pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED). Metode yang digunakan untuk memetakan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED) ini salah satunya dengan *Rapid Appraisal Techniques for Local Economic Development* (RALED) atau metode lainnya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tenaga Ahli Regional Pengembangan Lokal (TARPEL) Jawa Tengah dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/ kota sudah melakukan pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED). Hal ini terkait dengan pencapaian target yang diharuskan oleh Bappeda Jawa Tengah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/ kota untuk menyelesaikan tahap kedua dari *Local Economic Development* (LED).



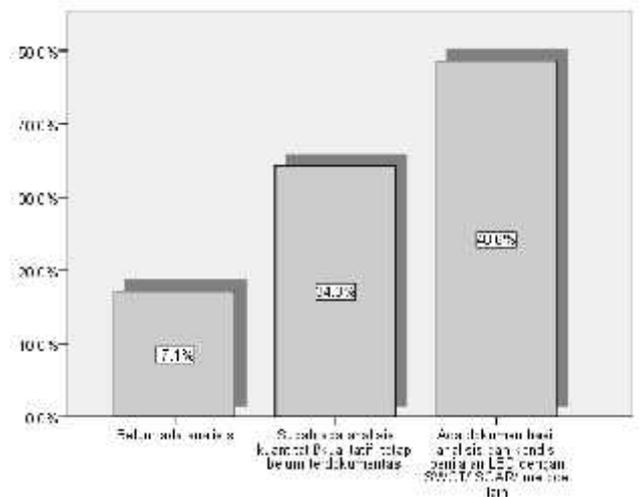
Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 10. Pemetaan Kondisi Dan Faktor Local Economic Development (LED)

Pada Gambar 10 dapat diketahui bahwa mayoritas kabupaten/ kota di Jawa Tengah tahun 2011 sudah melakukan pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED). Kabupaten/ kota yang telah melakukan pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED) dengan disertai dokumen hasil pemetaan adalah sebanyak 58,57 persen dari seluruh kabupaten/ kota, sedangkan yang sudah melakukan pemetaan tapi tidak terdokumentasi adalah sebanyak 25,71 persen. Adapun kabupaten/ kota yang belum melakukan pemetaan adalah sebanyak 5,71 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Selain pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED), analisis dan penilaian kondisi *Local Economic Development* (LED) juga perlu dilakukan. Analisis dan penilaian kondisi *Local Economic Development* (LED) dilakukan terhadap potensi lokal yang dimiliki oleh setiap kabupaten/ kota. Analisis terhadap potensi lokal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan produk unggulan yang kemudian dijadikan sebagai faktor pengungkit program *Local Economic Development* (LED). Tidak jauh berbeda dengan pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED), analisis dan penilaian kondisi *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah juga telah dilakukan oleh sebagian besar kabupaten/ kota.

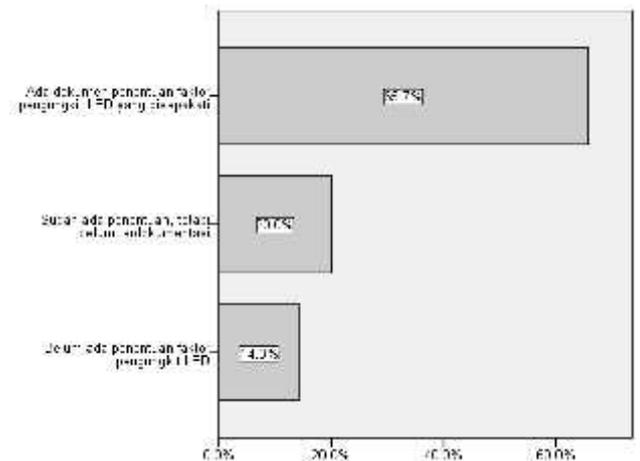
Pada Gambar 11 dapat diketahui bahwa pada tahun 2011 mayoritas kabupaten/ kota di Jawa Tengah telah melakukan dan memiliki dokumen hasil analisis dan kondisi penilaian *Local Economic Development* (LED) dengan metode SWOT/ SOAR atau metode lain. Jumlah kabupaten/ kota yang telah memiliki dokumen tersebut yaitu sebesar 48,6 persen dari 35 kabupaten/ kota yang ada, sedangkan yang sudah melakukan analisis tetapi belum terdokumentasi adalah sebesar 34,3 persen. Walaupun sebagian besar sudah melakukan analisis, tetapi masih ada kabupaten/ kota yang belum melakukan analisis dan penilaian terhadap potensi lokal yang dimiliki oleh setiap kabupaten/ kota adalah sebesar 17,1 persen.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 11. Analisis dan Penilaian Kondisi Local Economic Development (LED)

Setelah dilakukan pemetaan dan analisis terhadap kondisi dan faktor-faktor *Local Economic Development* (LED) di setiap kabupaten/ kota, maka hasil pemetaan dan analisis tersebut digunakan untuk menentukan faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED). Faktor-faktor pengungkit ini meliputi potensi lokal, faktor pendukung dan lingkungan strategis yang diperlukan untuk pengembangan kluster dan produk unggulan. Penentuan faktor pengungkit ini dilakukan melalui workshop FEDEP yang hasilnya adalah dokumen faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED) yang telah disepakati untuk dijalankan.



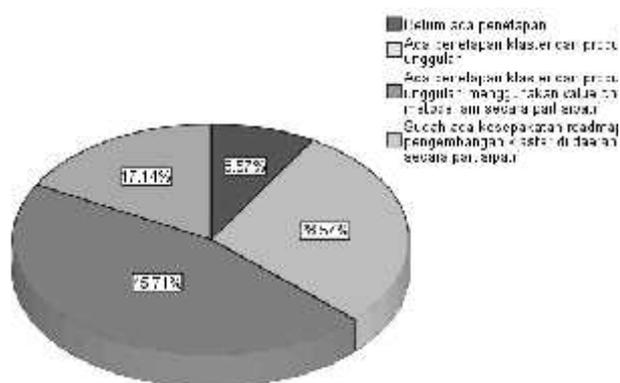
Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 12. Penentuan Faktor Pengungkit Local Economic Development (LED)

Seiring telah dilakukannya pemetaan dan analisis kondisi *Local Economic Development* (LED) di setiap kabupaten/ kota, penentuan faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED) di

sebagian besar kabupaten/ kota telah disepakati. Sebanyak 65,7 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah telah memiliki dokumen penentuan faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED) yang disepakati dan 20 persen dari seluruh kabupaten/ kota sudah melakukan penentuan faktor pengungkit tetapi belum terdokumentasi. Adapun kabupaten/ kota yang belum ada penentuan faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED) adalah berjumlah 14,3 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Inti dari tahapan pemetaan dan analisis kondisi *Local Economic Development* (LED) di setiap kabupaten/ kota adalah terbentuknya klaster dan produk unggulan yang disepakati untuk dijadikan *prime mover* bagi perekonomian masyarakat. Berdasarkan kriteria utama produk unggulan yang ada dan analisis *value chain* yang telah dilakukan, klaster yang ada di Jawa Tengah dikelompokkan menjadi tiga sektor utama yaitu pertanian, industri dan pariwisata. Adapun kondisi penetapan klaster dan produk unggulan di setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 dapat dilihat pada Gambar 13.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 13. Penetapan Klaster dan Produk Unggulan

Pada Gambar 13 dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Tengah telah melakukan penetapan klaster dan produk unggulan dengan menggunakan metode *value chain* atau metode lain secara partisipatif. Bahkan sebanyak 17,14 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah telah menyepakati roadmap pengembangan klaster di daerah secara partisipatif. Adapun kabupaten/ kota yang sudah menetapkan klaster dan produk unggulan tetapi tanpa melalui analisis *value chain* atau lainnya ada sebanyak 28,57 persen, sedangkan yang belum menetapkan klaster dan produk unggulan masih ada sebesar 8,57 persen.

Masih adanya daerah yang belum melakukan pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED), belum melakukan analisis dan penilaian kondisi *Local Economic Development* (LED), tidak memiliki dokumen penentuan faktor

pengungkit *Local Economic Development* (LED) yang disepakati, serta belum melakukan penetapan klaster dan produk unggulan disebabkan beberapa hal seperti yang dikemukakan oleh Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 berikut ini:

"Kendala pemetaan kondisi dan faktor terkait dengan Local Economic Development (LED) diantaranya pemahaman akan siklus dan roadmap Local Economic Development (LED) dari kader Local Economic Development (LED) dan para pelaku di kab/kota yang masing kurang, belum mempunyai kader Local Economic Development (LED) daerah dalam mengawal proses Local Economic Development (LED) di kabupaten/ kota, serta kemampuan pendokumentasian dari pelaku Local Economic Development (LED) yang masih lemah".

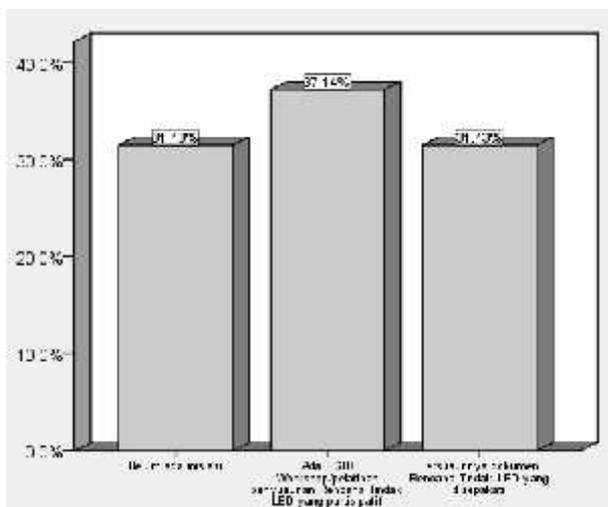
4. Penyusunan Rencana Tindak *Local Economic Development* (LED), Rencana Bisnis dan Internalisasi Pada Anggaran Daerah

Prioritas program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah pada tahun 2011 adalah terselesainya tahap ketiga dari roadmap *Local Economic Development* (LED). Tahapan tersebut yaitu penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED), rencana bisnis usaha dan internalisasi pada anggaran daerah. Tujuan dari tahap ini adalah tersusunnya dokumen rencana kerja yang akan dilakukan pada program *Local Economic Development* (LED) di kabupaten/ kota yang telah meliputi teknis operasionalnya. Oleh karena itu, selain penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) dan rencana bisnis klaster, pada tahapan ini juga dilakukan pengadopsian program *Local Economic Development* (LED) pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan dukungan dana yang mampu diberikan melalui penyusunan matriks finansial. Secara sederhana tahapan penyusunan rencana tindak disampaikan oleh Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 yaitu sebagai berikut:

"Penyusunan rencana tindak dilakukan oleh tiap-tiap Bappeda dan FEDEP kabupaten/ kota, dibantu oleh kader lokal TARPEL. Dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan mengevaluasi hasil capaian, melihat kembali roadmap program Local Economic Development (LED) untuk kemudian menyusun rencana tindak".

Penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) merupakan penyusunan program-program prioritas strategis yang dilakukan pada tingkat kota dan kabupaten dalam rangka mendukung fokus kegiatan pengembangan klaster dan produk unggulan daerah. Penyusunan rencana tindak *Local*

Economic Development (LED) dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), workshop dan pelatihan dengan melibatkan partisipasi para stakeholder. Penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) ini diharapkan menghasilkan dokumen rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang telah disepakati.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

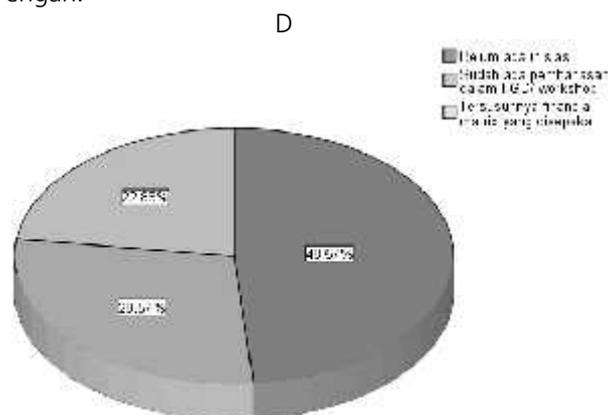
Gambar 14. Penyusunan Rencana Tindak *Local Economic Development* (LED)

Gambar 14 menunjukkan kondisi kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED). Sebagian besar kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 belum menyusun rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang terlihat dari 37,14 persen kabupaten/kota baru melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), workshop dan pelatihan terkait penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang partisipatif. Ditambah lagi masih ada kabupaten/kota yang belum melakukan inisiasi untuk menyusun rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yaitu sebesar 31,43 persen. Adapun yang telah menyusun rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang partisipatif adalah sebanyak 31,43 persen dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.

Rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang telah disusun secara partisipatif dalam realisasinya membutuhkan dukungan dana baik yang bersumber dari APBD maupun non APBD. Susunan program dalam rencana tindak dan sumber dana pembiayaannya disusun dalam *financial matrix*. Fungsinya adalah untuk memudahkan operasionalisasi program dan internalisasi program dalam anggaran dan rencana kerja daerah. Tujuan akhirnya adalah didapatkan pola kapasitas pendanaan yang memadai dalam mendukung keberhasilan program *Local Economic Development* (LED).

Pada Gambar 15 dapat dilihat kondisi kabupaten/kota dalam menyusun *financial matrix*

yang mencakup dana yang bersumber dari APBD maupun non APBD. Kondisi yang belum sesuai harapan dalam penyusunan *financial matrix* terlihat pada Gambar 15 di mana hanya 22,86 persen saja kabupaten/kota di tahun 2011 yang telah menyusun dan menyepakati *financial matrix*. Kondisi yang belum sesuai harapan ini juga terlihat dari sebagian besar kabupaten/kota yang belum ada inisiasi untuk menyusun *financial matrix* yaitu sebesar 48,57 persen, sedangkan yang sudah ada pembahasannya baik melalui *focus group discussion* maupun workshop hanya sebesar 28,57 persen dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 15. Penyusunan *Financial Matrix* Mencakup Sumber APBD dan Non APB

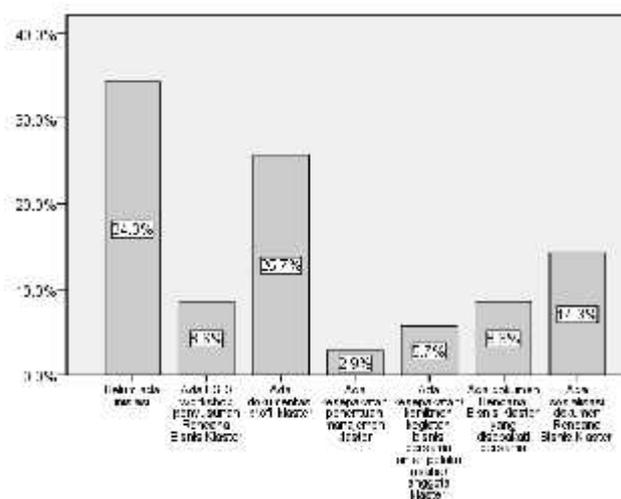
Masih adanya daerah yang belum melakukan inisiasi baik dalam menyusun rencana tindak *Local Economic Development* (LED) maupun penyusunan *financial matrix* lebih disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 berikut ini:

"Kendala utama dalam menyusun rencana tindak Local Economic Development (LED) dan financial matrix adalah pemahaman akan siklus dan roadmap pel yang masing kurang dari kader LED dan para pelaku LED di kabupaten/kota, serta belum mempunyai kader LED daerah dalam mengawal proses pel di kabupaten/kota".

Selain penyusunan *financial matrix*, tahapan berikutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan rencana bisnis. Penyusunan rencana bisnis ditujukan untuk memberikan acuan bagi kluster usaha unggulan untuk mengembangkan bisnis usaha yang menghasilkan produk unggulan daerah. Kondisi kabupaten/kota terkait penyusunan rencana bisnis sangat beragam. Kondisi kabupaten/kota terkait penyusunan rencana bisnis kluster usaha ini antara lain belum ada inisiasi penyusunan rencana bisnis, sudah ada FGD/workshop terkait penyusunan rencana bisnis,

sudah ada dokumentasi profil klaster, sudah ada kesepakatan penentuan manajemen klaster, sudah ada kesepakatan atau komitmen kegiatan bisnis bersama antar pelaku usaha/ anggota klaster, ada dokumen rencana bisnis klaster yang disepakati bersama, dan sudah ada sosialisasi dokumen rencana bisnis.

Sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Tengah pada tahun 2011 belum ada inisiasi dalam penyusunan rencana bisnis klaster usaha. Hal ini terlihat dari 34,3 persen kabupaten/ kota di Jawa Tengah belum ada inisiasi dalam hal tersebut. Kondisi terbanyak kedua adalah baru ada dokumentasi profil klaster yaitu sebesar 25,7 persen dari kabupaten/ kota yang ada dan diikuti dengan kabupaten/ kota yang sudah melakukan sosialisasi dokumen rencana bisnis klaster yaitu sebesar 14,3 persen. Adapun kabupaten/ kota yang sudah memiliki dokumen rencana bisnis klaster tetapi belum melakukan sosialisasi yaitu sebanyak 8,6 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Selain beberapa kondisi tersebut, kondisi kabupaten/ kota lainnya antara lain sudah melakukan FGD/ workshop terkait penyusunan rencana bisnis klaster sebesar 8,6 persen, sudah ada kesepakatan/ komitmen kegiatan bisnis bersama antar pelaku usaha/ anggota klaster sebesar 5,7 persen, dan sudah ada kesepakatan penentuan manajemen klaster sebesar 2,9 persen.

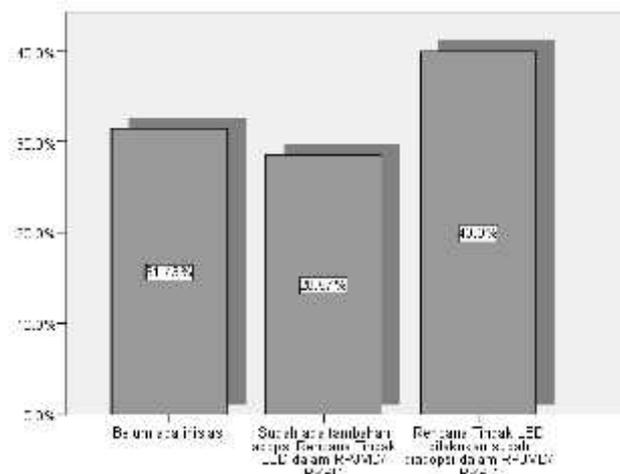


Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 16. Penyusunan Rencana Bisnis Klaster Usaha

Kondisi masih banyaknya daerah yang belum melakukan inisiasi untuk menyusun rencana bisnis klaster disebabkan oleh permasalahan yang sama dengan penyusunan rencana tindak maupun financial matrix yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 berikut ini: "Selain disebabkan kurangnya pemahaman kader LED dan para pelaku LED akan siklus dan roadmap

LED serta belum mempunya kader LED dan para pelaku LED dalam mengawal program LED, masih adanya daerah yang belum melakukan inisiasi dalam menyusun rencana bisnis klaster disebabkan juga oleh kurangnya kemampuan kader LED dan para pelaku LED dalam menyusun rencana bisnis itu sendiri serta kurangnya koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait".



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 17. Adopsi dalam RPJMD, RKPd, APBD dan Non APBD

Baik rencana tindak *Local Economic Development* (LED) maupun rencana bisnis klaster perlu diharmonisasikan dan diinternalisasikan ke dalam program Pemerintah Daerah. Internalisasi ini dilakukan melalui pengadopsian program-program *Local Economic Development* (LED) ke dalam rencana program (RPJMD atau RKPd) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi pengadopsian program-program *Local Economic Development* (LED) di kabupaten/ kota terbagi menjadi tiga kondisi utama yaitu belum ada inisiasi, sudah ada tambahan adopsi rencana tindak *Local Economic Development* (LED) dalam RPJMD/ RKPd, dan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang dilakukan sudah diadopsi dalam RPJMD/ RKPd.

Pada Gambar 17 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 sebagian besar rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang dilakukan oleh kabupaten/ kota di Jawa Tengah sudah diadopsi dalam RPJMD/ RKPd. Jumlah kabupaten/ kota dengan kondisi tersebut yaitu sebanyak 40 persen. Adapun kabupaten/ kota yang telah menambahkan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) ke dalam RPJMD/ RKPd sudah mencapai 28,57 persen. Selain itu, kabupaten/ kota yang belum melakukan inisiasi juga masih cukup besar yaitu 31,43 persen dari kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah.

Sebagai penyambung antara kepentingan masyarakat dalam program LED, peran Bappeda yang merupakan bagian dari pelaku LED menjadi

sangat vital. Terutama dalam memperjuangkan program-program LED untuk dapat diadopsi dalam RPJMD, RKPD atau bahkan APBD. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 seperti berikut ini:

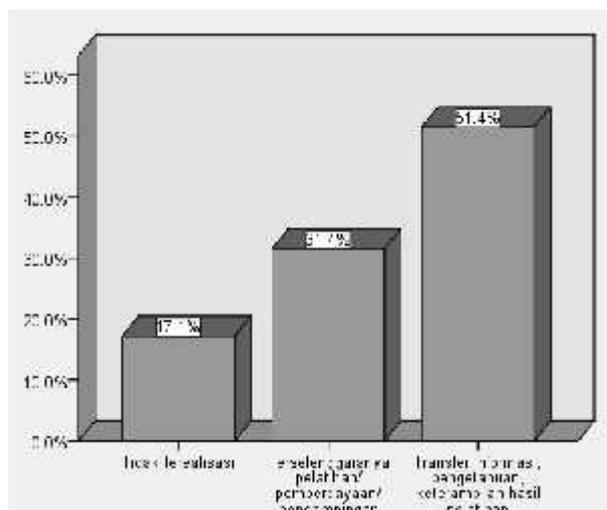
"Faktor utama yang menyebabkan program LED mampu diadopsi dalam RPJMD, RKPD atau bahkan APBD adalah pemahaman dan ketersediaan dari Bappeda setiap kabupaten/ kota untuk memperjuangkan konsep LED ke dalam dokumen-dokumen perencanaan kabupaten/ kota tersebut".

Adapun menurut Ibu Artiningsih, anggota TARPEL Jawa Tengah dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Diponegoro, tanggal 20 Maret 2013, menyatakan bahwa kondisi penyusunan rencana tindak baik itu rencana tindak *Local Economic Development* (LED) maupun rencana tindak bisnis klaster masih ditandai dengan belum terumuskannya rencana tindak yang spesifik, terukur dan realistis. Apalagi penyusunan rencana tindak belum dilakukan sepenuhnya secara partisipatif dan kebermanfaatannya rencana tindak juga belum dirasakan oleh stakeholder. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Artiningsih tanggal 20 Maret 2013 seperti berikut ini:

"Kondisi penyusunan rencana kerja dan tindak Local Economic Development (LED) belum sepenuhnya disepakati secara partisipatif oleh seluruh stakeholder, tujuan rencana kerja dan tindak Local Economic Development (LED) yang SMART (specific, measurable, attainable, realistic, time bound) belum terumuskan, kemanfaatan rencana kerja dan tindak Local Economic Development (LED) dalam mendukung LED belum dirasakan seluruh stakeholder, tahap adopsi LED dalam RPJM mendahului penyusunan rencana kerja dan tindak Local Economic Development (LED), serta belum terintegrasi dengan APBD".

5. Pelaksanaan Program *Local Economic Development* (LED)

Inti dari kegiatan *Local Economic Development* (LED) adalah pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) itu sendiri. Rencana tindak *Local Economic Development* (LED) dan rencana bisnis klaster yang telah disusun pada tahapan sebelumnya menjadi acuan bagi pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) tersebut. Pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) setidaknya harus mencakup kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dan peningkatan promosi forum *Local Economic Development* (LED) dan atau klaster usaha dalam program *Local Economic Development* (LED). Selain itu, realisasi Pemerintah Daerah terhadap formulasi kebijakan yang dihasilkan oleh kelembagaan FEDEP juga merupakan bagian penting dari program *Local Economic Development* (LED).



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

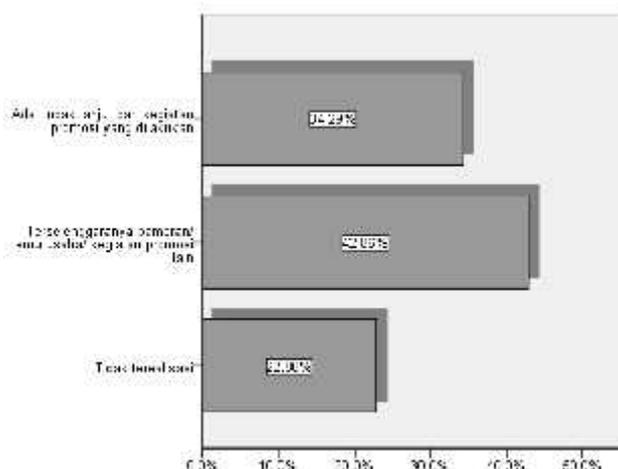
Gambar 18. Peningkatan Kualitas SDM Klaster/ Forum LED Sesuai Rencana Tindak LED

Sebagai motor penggerak program *Local Economic Development* (LED), kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam forum Sumber Daya Manusia (SDM) dan klaster usaha memegang peran penting bagi keberhasilan program tersebut. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ini dilakukan melalui pelatihan, pemberdayaan, pendampingan dan transfer informasi, pengetahuan dan keterampilan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) disusun ke dalam rencana tindak program *Local Economic Development* (LED) untuk dilaksanakan oleh masing-masing kabupaten/ kota.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam forum *Local Economic Development* (LED) dan klaster usaha di Jawa Tengah tergolong baik. Hal ini terlihat dari sudah adanya transfer informasi, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil dari pelatihan yang dilakukan di sebagian besar kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Kabupaten/ kota yang sudah melakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sampai pada kondisi tersebut yaitu sebesar 51,4 persen. Adapun kabupaten/ kota yang telah menyelenggarakan sebatas pelatihan, pemberdayaan dan pendampingan mencapai 31,4 persen, sedangkan yang tidak terealisasi ada sekitar 17,1 persen dari kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah (Gambar 18).

Setelah disepakatinya rencana tindak *Local Economic Development* (LED) dan rencana bisnis klaster usaha, salah satu kegiatan yang dilakukan dalam rencana tindak tersebut yaitu peningkatan promosi forum *Local Economic Development* (LED) dan klaster usaha. Tahapan ini dilakukan setelah klaster usaha telah melakukan rencana bisnis yang telah dibuat. Peningkatan promosi tersebut dilakukan melalui pameran, temu usaha dan

kegiatan promosi lainnya yang diharapkan ada tindak lanjut dari kegiatan promosi tersebut.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 19. Peningkatan Promosi Forum LED/ Klaster Usaha Sesuai Rencana Tindak LED

Pada Gambar 19 dapat diketahui bahwa sebagian besar kabupaten/ kota telah melakukan peningkatan promosi forum *Local Economic Development* (LED) dan klaster usaha sesuai rencana tindak yang telah dibuat. Kabupaten/ kota telah melakukan peningkatan promosi tersebut terbagi menjadi daerah yang telah menyelenggarakan pameran, temu usaha dan kegiatan promosi lainnya sebesar 42,86 persen dan daerah yang telah melakukan tindak lanjut dari promosi tersebut yaitu sebesar 34,29 persen. Namun demikian, masih ada juga kabupaten/ kota yang tidak merealisasikan peningkatan promosi sesuai dengan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) yang telah dibuat. Kabupaten/ kota yang tidak merealisasikan peningkatan promosi sesuai dengan rencana tindak *Local Economic Development* (LED) berjumlah 22,86 persen dari total kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah.

Peningkatan promosi forum *Local Economic Development* (LED) dan klaster usaha sangat dipengaruhi oleh keberlanjutannya promosi tersebut dan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 seperti berikut ini:

"Keberhasilan dalam melakukan peningkatan promosi forum LED dan klaster usaha disebabkan oleh pelaksanaannya yang dilakukan terus menerus dan berkelanjutan, dengan mendorong semua pihak untuk dapat terlibat dan memberikan dukungan untuk ikut serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kualitas SDM pelaku klaster serta promosi pemanfaatan teknologi informasi yang terkait hal tersebut".

Terkait dengan promosi, Ibu Artiningsih, anggota TARPEL Jawa Tengah dan Dosen

Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Diponegoro, tanggal 20 Maret 2013 menyatakan bahwa:

"Model bisnis atau usaha di sebagian besar klaster di Jawa Tengah biasanya masih berbasis keluarga, sehingga membangun trust itu sulit. Paling tidak pemasaran atau promosi yang dapat dilakukan bersama hanya sebatas pameran dan untuk proses produksinya masih sendiri-sendiri tidak bersifat klaster".

Terkait dengan klaster, perlu juga dilihat berbagai aspek diantaranya persebaran klaster di daerah, bantuan yang diterima klaster tersebut, peran bantuan tersebut, dan peran klaster terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persebaran klaster yang tidak merata atau terfokus di beberapa kecamatan menjadi ciri khas pengembangan klaster di Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

"Klaster tersebar hanya di beberapa kecamatan sesuai kekuatan potensi dan kuatnya UKM (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)".

"Klaster di Kab. Batang tersebar tidak merata (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)"

"Klaster tersebar hanya di beberapa kecamatan (Usman Sidiq, FEDEP Kab. Brebes)".

Adapun bantuan yang diterima klaster di masing-masing daerah berbeda, ada yang hanya di bidang produksi saja dan ada juga yang sudah sampai ke pemasaran. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

"Bantuan di bidang produksi berupa bantuan alat produksi dan bantuan pemasaran juga sudah dilakukan (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)".

"Bantuan yang diberikan hanya di bidang produksi saja berupa pemberian bantuan mesin dan peralatan produksi (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)".

Terhadap bantuan tersebut, FEDEP kabupaten/ kota merasa bahwa bantuan tersebut belum optimal. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

"Bantuan saat ini belum optimal tetapi klaster dibina agar bisa mandiri sehingga tidak bergantung dengan pemerintah atau lembaga donor (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)".

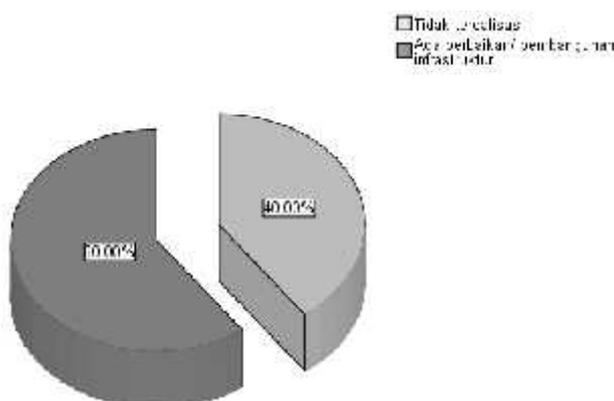
"Bantuan belum optimal, dibutuhkan sinergitas bantuan sehingga lebih mengoptimalkan kinerja klaster (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)".

Dengan kondisi kluster seperti itu, sangat wajar jika keberadaan kluster saat ini belum optimal dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

"Peran kluster dalam memberdayakan ekonomi masyarakat tentu belum optimal, perlu dilakukan secara bertahap dan dievaluasi untuk perbaikan (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)".

"Belum, karena kluster yang terbentuk masih belum menjadi kluster yang mandiri (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)".

Pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah juga tidak terlepas dari peran FEDEP dalam memberikan rekomendasi formulasi kebijakan kepada pemerintah. Terkait hal tersebut, rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan adalah salah satunya pembangunan infrastruktur di daerah pelaksana program *Local Economic Development* (LED). Pembangunan infrastruktur ini diperlukan untuk mendukung kegiatan yang telah disusun dalam rencana tindak *Local Economic Development* (LED) dan kegiatan yang dilakukan kluster usaha.



Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Gambar 20. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Pada Gambar 20 dapat dilihat kondisi realisasi rekomendasi kebijakan yang diajukan FEDEP kepada Pemerintah Daerah terkait dengan perbaikan atau pembangunan infrastruktur di setiap kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Sebagian besar dari kabupaten/ kota telah merealisasikan perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh FEDEP yaitu sebanyak 60 persen dari seluruh kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Adapun yang tidak merealisasikan ada sekitar 40 persen dari seluruh kabupaten/ kota di Jawa Tengah.

Keberhasilan dalam merealisasikan rekomendasi kebijakan terkait dengan perbaikan atau pembangunan infrastruktur ini Bapak Massa, anggota FPESD dan TARPEL Jawa Tengah, tanggal 21 Januari 2013 menyatakan bahwa:

"Keberadaan stakeholder yang beragam dari berbagai unsur merupakan kunci utama agar rekomendasi kebijakan yang diajukan oleh FEDEP dapat direalisasi. Selain itu diperlukan juga komunikasi dengan berbagai pihak dan intervensi perencanaan baik selama penyusunan proses perencanaan maupun pelaksanaannya".

Secara garis besar, pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) baik dari kelembagaan sampai pelaksanaannya sangat bergantung pada aktor yang terlibat di dalamnya. Dari SKPD dan Bappeda seharusnya tidak melakukan mutasi dan rotasi perwakilannya dalam waktu jangka pendek dan peran local champion juga harus dioptimalkan agar modal sosial dalam kluster dapat mendorong keberhasilan program *Local Economic Development* (LED). Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Artiningsih, anggota TARPEL Jawa Tengah dan Dosen Perencanaan Wilayah dan Tata Kota Universitas Diponegoro, tanggal 20 Maret 2013 seperti berikut ini:

"Adanya leadership kuat dari 'local champion' dalam kluster secara voluntary mampu mendorong pengembangan modal sosial dalam kluster untuk melakukan kerjasama, jejaring, transfer pengetahuan dan peningkatan usaha bersama kluster (pengalaman kluster pariwisata berbasis pertanian organik di Betisrejo, Sragen dan Kluster Pengasapan Ikan di Wonosari, Demak)".

"Kendala yang seringkali menyebabkan kelembagaan Local Economic Development (LED) stagnan bahkan mundur salah satunya adalah seringkali pemutasian perwakilan dari SKPD, sehingga orangnya baru lagi dan harus belajar lagi. Dan itu seringkali mempengaruhi atmosfer bisnis yang sudah dibangun, bahkan tidak hanya bisnis tetapi juga mengganggu kerjasama dan program yang sudah direncanakan".

6. Monitoring dan Evaluasi Program *Local Economic Development* (LED)

Kegiatan monitoring dilakukan dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) oleh perangkat kota dan kabupaten, serta pelaku usaha. Adapun kegiatan evaluasi program *Local Economic Development* (LED) ditujukan untuk menilai kinerja pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED), serta perangkat pendukungnya dalam rangka untuk merumuskan perbaikan program dan penguatan perangkat pelaksana program *Local Economic Development* (LED). Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan baik setiap tahapan maupun secara keseluruhan.

Secara umum, semakin jauh tahapan program *Local Economic Development* (LED) yang dilakukan maka semakin banyak kabupaten/ kota yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi pada tiap tahapannya. Hal ini terlihat dari jumlah

dan persentase kabupaten/ kota yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi tahap I yaitu sebanyak 11 kabupaten/kota dan atau 31,4 persen, yang setelah itu semakin meningkat sampai pada tahap IV menjadi 32 kabupaten/kota dan atau 91,4 persen.

Tabel 1. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Program *Local Economic Development* (LED) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Tahapan	Tidak Melakukan		Melakukan		Ada Dokumen Monev	
	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	Jumlah	(%)
I	11	31,4	17	48,6	7	20,0
II	20	57,1	8	22,9	7	20,0
III	28	80,0	4	11,4	3	8,6
IV	32	91,4	2	5,7	1	2,9

Sumber : Data monitoring dan evaluasi TARPEL Jawa Tengah 2011 (diolah)

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahap I mayoritas kabupaten/ kota sudah melakukan monitoring dan evaluasi, di mana 48,6 persen telah melakukan tanpa dokumen dan 20 persen sudah terdokumentasi. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahapan selanjutnya di mana mayoritas kabupaten/ kota tidak melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pada tiap tahapannya. Pada tahap II sebesar 57,1 persen kabupaten/ kota tidak melakukan monitoring dan evaluasi, serta meningkat pada tahap III sebesar 80 persen dan tahap IV sebesar 91,4 persen. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kabupaten/ kota yang melakukan monitoring dan evaluasi. Apabila dilihat berdasarkan daerah yang sudah melakukan monitoring dan evaluasi serta terdokumentasi dengan baik, pada tahap 1 terdapat 7 daerah dan semakin menurun sampai pada tahap IV menjadi 1 daerah.

Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program *Local Economic Development* (LED), keberhasilan program dengan telah memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada menjadi harapan bagi pelaku program tersebut. Kunci keberhasilan program ini diantaranya komitmen kepala daerah, komitmen SKPD terkait, partisipasi masyarakat, pembinaan secara intensif, pengembangan semangat kewirausahaan, pengembangan produk yang berorientasi pasar, kebijakan program pemerintah yang pro ekonomi kerakyatan, dukungan dana yang memadai, perlunya kerjasama antar daerah, dan kerjasama dengan investor untuk tujuan ekspor. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

"Kunci utama bagi keberhasilan Local Economic Development diantaranya pembinaan secara intensif, pengembangan semangat kewirausahaan,

pengembangan produk yang berorientasi pasar, kebijakan program pemerintah yang pro ekonomi kerakyatan, dukungan dana yang memadai, perlunya kerjasama antar daerah, dan kerjasama dengan investor untuk tujuan ekspor (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)"

"Kunci keberhasilan Local Economic Development diantaranya komitmen kepala daerah, komitmen SKPD terkait, dan partisipasi masyarakat melalui kelembagaan klaster (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)"

Adapun kelemahan-kelemahan yang dihadapi dalam program *Local Economic Development* (LED) di daerah diantaranya kurangnya pembinaan, kurangnya semangat kewirausahaan, tidak tergalinya dan terolahnya potensi lokal, kurangnya kualitas produk sesuai kebutuhan pasar, kurangnya fasilitasi modal, tidak adanya komitmen kepala daerah dan belum adanya grand kebijakan pengembangan ekonomi local sehingga pengembangan ekonomi local tidak terarah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara tanggal 6 Desember 2012 berikut ini:

"Yang menjadi kelemahan pada Local Economic Development saat ini diantaranya kurangnya pembinaan, kurangnya semangat kewirausahaan, tidak tergalinya dan terolahnya potensi lokal, kurangnya kualitas produk sesuai kebutuhan pasar, dan kurangnya fasilitasi modal (Cipto Utomo, Bappeda Kab. Purbalingga)"

"Tidak adanya komitmen kepala daerah dan belum adanya grand kebijakan pengembangan ekonomi local sehingga pengembangan ekonomi local tidak terarah (Abri Harto Edi Wibowo, FEDEP Kab. Batang)"

"Ketergantungan UKM pada bantuan pemerintah, rendahnya SDM pelaku program Local Economic Development dan minimnya modal (Usman Sidiq, FEDEP Kab. Brebes)"

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data mengenai rencana pendirian perusahaan daerah jasa pelaksana konstruksi di Kabupaten Pemalang, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah secara kelembagaan dilaksanakan oleh Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya (FPESD) dan *Forum for Economic Development and Employment Promotion* (FEDEP). Keanggotaan FPESD dan FEDEP setidaknya terdiri dari asosiasi pengusaha, perusahaan besar, *Bussines Development Services* (BDS) dan instansi publik. Secara garis besar, peta jalan (*roadmap*) dari kegiatan program *Local Economic Development* (LED) dikejawantahkan dalam tahapan-tahapan

- kegiatan yang terdiri dari penyiapan dan penguatan platform kelembagaan (FEDEP), pemetaan dan analisis kondisi (LED), penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED), rencana bisnis usaha dan internalisasi pada anggaran daerah, pelaksanaan program (LED), serta monitoring, evaluasi, dan perbaikan.
2. Kondisi tahapan penguatan platform kelembagaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah dapat dilihat dari intensitas dialog multistakeholder dalam forum LED/ FEDEP yang masih tergolong sangat rendah yaitu melakukan dialog minimal sekali dalam dua bulan, partisipasi anggota FEDEP dalam rapat atau dialog tergolong tinggi dengan kehadiran anggota lebih dari 50 persen, upaya promosi kelembagaan FEDEP dan promosi kluster yang tergolong masih sangat sederhana²³⁴ a sebatas melalui leflet, booklet dan ; sebanyak 18 FEDEP/ Forum *Local Economic Development* (LED) sudah melakukan kerjasama dengan lembaga setingkat regional/ provinsi, sebanyak 13 FEDEP kabupaten/ kota sudah menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sudah ditindaklanjuti dan ada evaluasi terhadap yang belum ditindaklanjuti, serta perolehan dana pendamping baik dari dana eks 2 POA maupun APBD kabupaten/ kota relatif tetap.
 3. Kondisi pemetaan dan analisis kondisi *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah dapat dilihat dari beberapa indikator. Kondisi indikator tersebut diantaranya adalah sebanyak 30 kabupaten/ kota sudah melakukan pemetaan kondisi dan faktor *Local Economic Development* (LED), sebanyak 29 kabupaten/ kota juga telah melakukan dan memiliki dokumen hasil analisis dan kondisi penilaian *Local Economic Development* (LED) dengan metode SWOT/ SOAR atau metode lain, penentuan faktor pengungkit *Local Economic Development* (LED) di 30 kabupaten/ kota telah disepakati, serta sebanyak 32 kabupaten/ kota telah melakukan penetapan kluster dan produk unggulan dengan menggunakan metode value chain atau metode lain secara partisipatif.
 4. Dalam penyusunan rencana tindak *Local Economic Development* (LED), rencana bisnis dan internalisasi pada anggaran daerah, sebanyak 24 kabupaten/ kota di Jawa Tengah belum menyusun rencana tindak *Local Economic Development* (LED), 17 kabupaten/ kota belum ada inisiasi untuk menyusun financial matrix, 12 kabupaten/ kota belum ada inisiasi dalam penyusunan rencana bisnis kluster usaha, serta sebanyak 24 kabupaten/ kota di Jawa Tengah sudah mengadopsi rencana tindak *Local Economic Development* (LED) ke dalam RPJMD/ RPKD.
 5. Dalam pelaksanaan program *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah telah terjadi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat dalam forum *Local Economic*

Development (LED) dan kluster usaha yang terlihat dari sudah adanya transfer informasi, pengetahuan, dan keterampilan sebagai hasil dari pelatihan yang dilakukan di 29 kabupaten/ kota yang ada di Jawa Tengah. Kondisi yang cukup baik dari tahap ini terlihat dari 27 kabupaten/ kota telah melakukan peningkatan promosi forum *Local Economic Development* (LED) dan kluster usaha sesuai rencana tindak yang telah dibuat, serta 21 kabupaten/ kota telah merealisasikan perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang diajukan oleh FEDEP.

6. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi program *Local Economic Development* (LED) terlihat bahwa semakin jauh tahapan program *Local Economic Development* (LED) yang dilakukan maka semakin banyak kabupaten/ kota yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi pada tiap tahapannya.

Terkait dengan kesimpulan tersebut, pemerintah diharapkan melakukan optimalisasi sinkronisasi program baik secara horizontal di daerah, maupun secara vertikal antara pemerintah daerah dengan pemerintahan di atasnya. Penguatan kelembagaan dan pelaksanaan *Local Economic Development* (LED) di Jawa Tengah harus dioptimalkan, terutama dengan menyiapkan kader *Local Economic Development* (LED) yang berkelanjutan dan menghindarkan mutasi dan rotasi dalam tubuh FEDEP atau FPESD yang bersifat jangka pendek. Harapannya adalah kader *Local Economic Development* (LED) benar-benar memahami baik konsep maupun pelaksanaan *Local Economic Development* (LED). Peran dan partisipasi masyarakat dalam proses *Local Economic Development* (LED) perlu ditingkatkan terutama dalam menopang pengembangan kluster dan pembentukan usaha baru, sehingga akan menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya akan menciptakan dampak ganda bagi perekonomian. Pengembangan kluster usaha sebaiknya tidak hanya dilakukan secara horizontal tetapi juga secara vertikal melalui kerjasama dengan perusahaan besar atau mapan sehingga keberlanjutan dan pengembangan kluster usaha tersebut dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2012. *Jawa Tengah dalam Angka 2012*. Available downloadedat: <http://jateng.bps.go.id/> Publikasi%20Terbit /jawa%20tengah%20dalam%20angka%202012/index.html

- Bappeda Jawa Tengah. 2011. *Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Di Jawa Tengah*. Semarang : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah.
- Chariri, Anis. 2009. *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009.
- Iqbal, Muhammad dan Iwan Setiajie Anugrah. 2009. Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. *Analisis Kebijakan Pertanian Vol 7 No. 2 Juni 2009* : 160 – 188.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: BPFU UII Yogyakarta.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Mixed Methods: Cara Menggabung Riset Kuantitatif dan Kualitatif Secara Benar*. Jakarta: PT. Elex Komputindo, Kompas Gramedia.
- Supriyadi R, Ery. 2007. Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 18 No 2 Agustus 2007*, halaman 103 – 102.
- TARPEL Jawa Tengah. 2010. Model Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah. Makalah dalam *Workshop Forum Koordinasi Dan Sinergitas Program Pengembangan Klaster (Peningkatan Kader PEL Jawa Tengah)*, Semarang, 25-26 Agustus 2010.